



RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagai penyesuaian arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar berbagai kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini menjelaskan juga rencana pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2025, demi peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang. Diharapkan seluruh jajaran di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat mendukung tercapainya hasil kegiatan (*output*) secara optimal melalui koordinasi dan sinergisme kegiatan institusi pada tahun anggaran 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja 2025 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi bagi tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Kajian Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan	6
2.2 Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	10
2.3 Isu - isu Penting/Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	12
2.4 Reviu terhadap RKPD tahun 2025	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	15
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan	15
3.2 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	18
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Pelaksanaan per Komponen Belanja APBD BKD Prov. Sumsel Tahun 2025.....	6
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	17
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan jawaban yang lebih jelas dan tegas tentang kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, daerah dapat melakukan inisiatif sendiri sesuai dengan batasan-batasan tertentu serta dalam kerangka ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada pelaksanaannya ditentukan pada tiga asas penyelenggaraan, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi sebagai dasar pelaksanaannya telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil

Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan prima sesuai dengan fungsi dan tugasnya kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa pembangunan sumberdaya aparatur adalah ditujukan untuk terciptanya aparat yang selalu siap memberikan pelayanan yang berkualitas prima sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Aparat Pemerintah diharapkan dengan kemampuannya yang meningkat dapat mendayagunakan seluruh kapasitasnya mengelola dengan sebaik-baiknya segala macam sumber-sumber pelayanan termasuk infrastruktur administratif yang dimiliki demi pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan maksud tersebut di atas diperlukan PNS yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk itu dibutuhkan suatu pembinaan PNS melalui berbagai program yang terencana dengan baik dan berkelanjutan sehingga benar-benar dapat menunjang bagi terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang profesional.

1.2. Landasan Hukum

Kedudukan dan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.
 12. Rencana Strategis (Resntra) BKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan jangka pendek serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja bertujuan sebagai alat kendali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dinas, untuk mengetahui capaian hasil, kemajuan dan kendala guna mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW I dan perkiraan capaian tahun berjalan serta capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Kajian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.3 Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
- 2.4 Reviu terhadap RKPD Tahun 2025
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas
- 3.2 Pembangunan Nasional
- 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Kajian Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi. Menindaklanjuti hal itu, pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan triwulan I tahun 2025 pun harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD
- b. Konsisten dengan Rencana Strategis
- c. Program kegiatan yang diutamakan
- d. Masalah yang ada dan perlu diatasi
- e. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Sedangkan pada Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 juga memperhatikan

Keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan program yang telah ditetapkan termasuk hal-hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Bahwa pada tahun 2025, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengelola 2 (dua) program, 11 kegiatan, dan 35 Sub kegiatan terdapat 1 (satu) Program yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Program Kepegawaian.

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Pelaksanaan per Komponen Belanja APBD
BKD Prov. Sumsel Tahun 2025 (per TW III)

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Target s.d Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2* 100)	(6)	(7)
Belanja Daerah	20.016.944.846	12.224.701.273	92.28	61.07	92.28	70.49
Belanja Operasi	20.016.944.846	12.224.701.273	92.28	61.07	92.28	70.49
- Belanja Pegawai	14.432.591.000	10.525.020.124	89.08	72.93	89.08	72.93
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.159.673.000	4.765.427.270	87.00	77.36	87.00	77.36
- Belanja Pegawai Lainnya	8.272.918.000	5.759.592.854	91.15	69.62	91.15	69.63
- Belanja Barang/Jasa	5.584.353.846	1.699.681.149	95.48	30.44	95.48	64.20
Belanja Modal	-	-	-	-	-	-

1) Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Keuangan Total Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan ini sebesar Rp. 3.510.265.673,- atau 14.35% dan realisasi fisik 15.86%.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan ini sebesar Rp. 3.510.265.673,- atau 16.01% dan realisasi fisik 16.33%.

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan ini sebesar Rp 0,- atau 0% dan realisasi fisik 0%.

i. Realisasi Keuangan

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0 – 65 % : 1 subkegiatan
2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66 – 90% : 13 subkegiatan
3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi > 90% : 18 subkegiatan

ii. Realisasi Fisik

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0 – 65 % : 0
2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66 – 90 % : 0
3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi > 90 % : 32 subkegiatan

Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	Nilai IP ASN	%	81	-	-	Belum rilis
		Nilai NSPK	%	90	-	-	Belum rilis
2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	651,80	100	Telah sesuai target
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12	15,75	100	Telah sesuai target
		Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	89,96	100	Telah sesuai target
3	Meningkatkan Tingkat Kepuasan ASN yang melakukan layanan Kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	%	90	83,19	92,43	Belum sesuai target karena masih berjalan

Indikator RPD

Indikator RPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 –2026 adalah sebagai berikut:

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW I	Capaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	600,35	100	613,86	100	636,65	100	651.80	100	Telah sesuai target
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	14,86	9,46	14,21	9	15,27	12	15,75	100	Telah sesuai target
3	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	80	89,96	100	Telah sesuai target

2.2. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pada pelaksanaan RPJMD 2025-2029 Visi yang akan diwujudkan, yaitu:

“ SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA ”

“SumSel Maju Terus untuk Semua“, kalimat ini mengandung arti meneruskan program-program yang sudah ada sebelumnya demi tercapainya kondisi pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Kepegawaian Daerah mendukung Misi keenam yaitu:

“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas “

Misi meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas mengandung arti untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan berperan aktif dalam memenuhi Sasaran **Maju Aparatur Profesional & Berintegritas**.

Berdasarkan telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka posisi BKD Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Visi : SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Misi Keenam : *Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan public yang berkualitas.*

Sasaran Kedua : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

NO	TUJUAN BKD PROV. SUMSEL	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN BKD PROV. SUMSEL	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					[2025]	[2026]	[2027]	[2028]	[2029]
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi					
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya					
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya					
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik					
			Meningkatnya tingkat kepuasan ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian					

Dari tabel diatas maka urusan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan masuk dalam RPJMD tersebut adalah pada Program Kepegawaian. Dengan demikian, secara umum kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan lancar.

2.3 Isu-isu Penting/Strategis Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam Meningkatkan kualitas ASN yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian seiring terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara (UU ASN) dan komitmen untuk mengimplementasikan sistem merit.

2. Masih terdapat Missmatch antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi ASN dalam Jabatan sehingga perlu pemetaan dan penataan pegawai yang tepat serta membangun konsep pengembangan karir yang berkualitas mendasarkan manajemen talenta.
3. Kebutuhan sarpras (hardware/software) dan infrastruktur IT untuk peningkatan otomatisasi layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, terintegrasi dan paperless sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi.

2.4 Reviu Terhadap RKPD Tahun 2025

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dengan rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dijabarkan dengan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yang dijabarkan

dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 akan mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun dari Pemerintahan Provinsi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari pengamatan lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sumatera Selatan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di dalam menelaah usulan dari publik tetap mengacu dan mensinergikan pada tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang sedang melaksanakan percepatan peningkatan pelayanan publik.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

3.1.1. TUJUAN

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara secara Efisien dan Efektif dalam pelayanan Publik secara Profesional

3.1.2. SASARAN

- a. Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel*
- b. Meningkatkan Tata kelola ASN*
- c. Meningkatnya kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian*

INDIKATOR SASARAN

Indikator Sasaran merupakan alat ukur secara kuantitatif atau dapat juga kualitatif yang di kuantitatifkan yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, pening dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak serta proses.

5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persentase	n/a	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase	n/a	89%	90%	91%	92%	92%	93%	
3	Persentase pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	n/a	85%	88%	90%	92%	93%	95%	
4	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Persentase	n/a	90%	90%	91%	92%	92%	92%	
5	Persentase hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	Persentase	88%	89%	90%	90%	91%	91%	92%	
6	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	9%	10%	11%	11%	11%	12%	12%	

8	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	100%	80%	80%	81%	81%	82%	82%	
9	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	Persentase	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Persentase	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Persentase	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Persentase	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Upaya pencapaian sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam 2 Program, 11 Kegiatan serta 35 Sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu

14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17	Pengadaan Mebel
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
H	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
26	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
27	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
28	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
I	Mutasi dan Promosi ASN
29	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
30	Pengelolaan Promosi ASN

J	Pengembangan Kompetensi ASN
31	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
32	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
K	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
33	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
34	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
35	Pembinaan Disiplin ASN

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 - 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - 2) Pencapaian Renstra OPD;
 - 3) Pelaksanaan Tupoksi OPD
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan antara lain meliputi :
 - Jumlah program sebanyak 2 (dua) program dan jumlah kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan 36 (tiga puluh lima) sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan terfokus di Palembang.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Sumatera selatan sebesar Rp. 20.016.944.846,00.

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Keterangan
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Bertambah/ Berkurang			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
		KEPEGAWAIAN														
I	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	100%	100%	22.508.607.831	17.372.532.538	-5.136.075.293	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	100%	19.728.786.784	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
A	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	100%	100%	130.000.000	27.130.000	-102.870.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	100%	30.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
1	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Palembang	2 Dokumen	-	50.000.000	0	-50.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	-	0	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	

2	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Palembang	1 Dokumen	-	30.000.000	0	-30.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	-	0	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
3	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Palembang	3 laporan	3 laporan	50.000.000	27.130.000	-22.870.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	3 laporan	30.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
B	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN/Tenaga Administrasi Honorarium serta Honorarium Penatausahaan Pengujian	Palembang	100%	100%	15.367.105.324	14.722.511.000	644.594.324	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	100%	18.322.285.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
4	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	80 orang	80 orang	14.991.570.000	14.432.591.000	-558.979.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	80 orang	18.213.125.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
5	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	1 dokumen	1 dokumen	375.535.324	289.920.000	-85.615.324	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 dokumen	109.160.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	

D	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	100%	100%	736.235.507	246.010.254	-490.225.253	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	-	0	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
6	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta perlengkapannya	Palembang	1 paket	1 paket	200.000.000	155.000.000	-45.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	-	0	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
7	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Palembang	4 Orang	4 Orang	136.235.507	91.010.254	-45.225.254	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	-	0	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
8	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Palembang	50 orang	50 orang	400.000.000	0	-400.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	-	0	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	

E	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palembang	100%	100%	1.197.000.000	662.150.000	-534.850.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	100%	268.642.784	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
9	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	1 paket	1 paket	15.000.000	10.500.000	-4.500.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 paket	15.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
10	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Palembang	1 paket	1 paket	360.000.000	242.000.000	-118.000.000	-118.000.000	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 paket	60.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
11	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Palembang	1 paket	1 paket	300.000.000	165.000.000	-135.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 paket	72.642.784	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
12	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Palembang	1 paket	1 paket	17.000.000	11.900.000	-5.100.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	-	0	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	

13	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	1 laporan	-	15.000.000	0	-15.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	-	0	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
14	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	1 laporan	1 laporan	480.000.000	220.000.000	-260.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 laporan	114.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
15	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	12.750.000	2.750.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 Dokumen	7.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
F	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Penunjang Perangkat Daerah	Palembang	100%	100%	1.535.000.000	0	-1.535.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	100%	30.285.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
16	5.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Palembang	1 unit	-	700.000.000	0	-700.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	-	0	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	

17	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Palembang	1 paket	-	385.000.000	0	-385.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	-	0	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
18	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Palembang	5 jenis	-	250.000.000	0	-250.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	5 jenis	30.285.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
19	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Ssarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Palembang	1 Unit	-	200.000.000	0	-200.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	-	0	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
G	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Palembang	100%	100%	1.360.880.000	1.026.787.000	-334.093.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	100%	805.280.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
20	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	1 laporan	1 laporan	8.000.000	4.000.000	-4.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 laporan	1.200.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	

21	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Palembang	1 laporan	-	380.000.000	380.000.000	0	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 laporan	271.680.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
22	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah laporan penyediaan ajasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Palembang	1 laporan	1 laporan	972.880.000	642.787.000	-330.093.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 laporan	532.400.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
H	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Peralatan Perangkat Daerah	Palembang	100%	100%	2.182.387.000	687.944.284	-1.494.442.716	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	100%	272.294.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
23	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Palembang	24 unit	24 unit	400.000.000	282.000.000	-118.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	5 unit	91.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
24	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Palembang	10 unit	10 unit	50.000.000	35.000.000	-15.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	10 unit	14.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	

25	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Palembang	1 unit	1 unit	1.732.387.000	370.944.284	-1.361.442.716	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 unit	167.294.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
II	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks profesionalitas ASN	Palembang	1) 100%	1) 100%	1.947.910.000	2.644.412.308	696.502.308	PAD	Pegawai di lingkungan PemProv. Sumsel	100%	968.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
I	5.03.02.201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	Palembang	100%	100%	610.250.000	537.750.000	-72.500.000	PAD	Pegawai di lingkungan PemProv. Sumsel	100%	433.180.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
26	5.03.02.201.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Palembang	5 Dokumen	-	256.000.000	256.000.000	0	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	5 Dokumen	102.400.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	

27	5.03.02.201.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Palembang	1 Lembaga	1 Lembaga	200.000.000	128.000.000	-72.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 Lembaga	24.992.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
28	5.03.02.201.0010	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Palembang	1 Dokumen	1 Dokumen	154.250.000	153.750.000	-500.000.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 Dokumen	280.488.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
29	5.03.02.101.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Palembang	-	-	0	0	0	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 Dokumen	25.300.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
J	5.03.02.202	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase terisinya Jabatan, rotasi dan mutasi	Palembang	100%	100%	599.415.000	1.783.221.809	1.183.806.809	PAD	Pegawai di lingkungan PemProv. Sumsel	100%	269.366.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
30	5.03.02.202.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Palembang	1 Laporan	1 Laporan	49.415.000	27.621.809	-21.793.191	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 Laporan	12.366.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	

31	5.03.02.202.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Palembang	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000	1.755.600.000	1.205.600.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 Dokumen	257.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
K	5.03.02.203	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Palembang	100%	100%	339.415.000	245.492.500	-93.922.500	PAD	Pegawai di lingkungan PemProv. Sumsel	100%	229.094.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
32	5.03.02.203.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	Palembang	1 Dokumen	1 Dokumen	285.000.000	213.220.000	-71.780.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 Dokumen	219.094.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
33	5.03.02.203.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah fungsional ASN yang dibina	Palembang	500 orang	500 orang	54.415.000	32.272.500	-22.142.500	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	500 orang	10.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	

L	5.03.02.204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Palembang	100%	100%	398.830.000	77.948.000	-320.882.000	PAD	Pegawai di lingkungan PemProv. Sumsel	100%	36.840.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
34	5.03.02.204.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	Palembang	1 Dokumen	1 Dokumen	49.415.000	31.190.500	-18.224.500	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	1 Dokumen	8.440.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
35	5.03.02.204.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Palembang	600 Orang	600 Orang	300.000.000	32.600.000	-267.400.000	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	600 Orang	12.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
36	5.03.02.204.0010	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	Palembang	14.000 orang	14.000 orang	49.415.000	14.157.500	-35.257.500	PAD	Pegawai BKD Prov. Sumsel	14.000 orang	16.400.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Pembangunan Sumber DayaManusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan GenerasiZ), dan Penyandang Disabilitas	
Jumlah							24.456.517.831	20.016.944.846	-4.439.572.985				20.697.266.784			

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian Daerah merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Materi Rencana Kerja ini berisi rencana dari serangkaian program strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sangat tergantung pada dana yang tersedia dan sumber daya manusia yang memadai. Disamping itu diperlukan pula adanya kerjasama antara Pemerintah Pusat, Jajaran Dinas/Badan/Instansi Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disadari juga bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel ini, belum pada taraf sempurna dan belum memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini dimasa yang akan datang sangat kami harapkan agar tercapai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel yang baik lagi.

Palembang, 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ISMAIL FAHMI S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812151989031002